



JNPH

Volume 13 No. 1 (April 2025)

© The Author(s) 2025

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN (AKSI 2) KONVERGENSI DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN

THE EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTATION OF PROGRAMS AND ACTIVITIES (ACTION 2) CONVERGENCE IN ACCELERATING THE REDUCTION OF STUNTING IN SOUTH BENGKULU DISTRICT

MUHAMMAD SOLID ALIDI, M. SHUBUH, DUSIRIAH
PROGRAM STUDI MAGISTER KESEHATAN MASYARAKAT, FAKULTAS ILMU
KESEHATAN, UNIVERSITAS INDONESIA MAJU, JAKARTA, INDONESIA
Email: muhammadsolid99@gmail.com

ABSTRAK

Latar belakang: Upaya percepatan penurunan stunting akan lebih tepat apabila dilakukan secara terintegrasi, holistik dan konvergensi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari tingkat desa sampai pusat. Tujuan penelitian ini untuk menilai efektivitas program penanganan stunting dan mengkaji faktor penghambat tercapainya efektivitas program penanganan stunting melalui aksi dua konvergensi di kabupaten Bengkulu Selatan. Metode : Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan sumber data sekunder dan primer dengan melakukan analisis terhadap kelengkapan dokumen Aksi 2 dan wawancara mendalam kepada stakeholder. Hasil : Temuan dari penelitian ini bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan didalam melaksanakan program percepatan penurunan stunting sudah sesuai Perpres 72/2021 tentang percepatan penurunan stunting dan Perka BKKBN tentang RAN PASTI serta didalam penyusunan rencana kegiatan pada Aksi 2 Konvergensi stunting sudah sesuai kode nomenklatur program/kegiatan yang relevan terhadap seluruh indikator dalam penyusunan rencana kegiatan pada Aksi 2. Kesimpulan: Program percepatan penurunan stunting dengan pendekatan penyusunan rencana kegiatan (aksi 2) konvergensi stunting di kabupaten Bengkulu Selatan sudah berjalan dengan efektif sesuai dengan standar dan indikator dan output yang telah ditetapkan. Namun, masih ditemukannya hambatan antara lain perbedaan persepsi, tagging pendanaan yang bersumber dari APBD atau APBN dan sumber lainnya, optimalisasi Tim Pendamping Keluarga (TPK), serta ketepatan dalam pencatatan dan pelaporan, serta ego sektoral dan program dari masing-masing OPD.

Kata Kunci: Kebijakan Stunting, Konvergensi, Perencanaan & Penganggaran

ABSTRACT

Efforts to accelerate stunting reduction will be more appropriate if carried out in an integrated,

holistic and convergent manner by involving all stakeholders from the village to the central level. The purpose of this study was to assess the effectiveness of the stunting management program and to examine the inhibiting factors in achieving the effectiveness of the stunting management program through two convergence actions in Bengkulu Selatan district. This study uses a qualitative descriptive approach with secondary and primary data sources by analyzing the completeness of Action 2 documents and conducting in-depth interviews with stakeholders. The method used in this research was descriptive with a population of all female students at SMK Negeri 3 Bengkulu City, totaling 728 people. The sampling technique used was accidental sampling, with a sample size determined using the Slovin formula of 97 people. The findings of this study are that the Bengkulu Selatan Regency Government in implementing the stunting reduction acceleration program has complied with Presidential Regulation 72/2021 concerning the acceleration of stunting reduction and the BKKBN Regulation concerning RAN PASTI and in the preparation of the activity plan for Action 2 of Stunting Convergence, it has complied with the relevant program/activity nomenclature code for all indicators in the preparation of the activity plan for Action 2. The stunting reduction acceleration program with the approach of preparing an activity plan (action 2) of stunting convergence in Bengkulu Selatan district has been running effectively in accordance with the standards and indicators and outputs that have been set. However, obstacles are still found, including differences in perception, tagging of funding sourced from the APBD or APBN and other sources, optimization of the Family Assistance Team (TPK), and accuracy in recording and reporting, as well as sectoral egos and programs from each OPD.

Keywords: Stunting Policy, Convergence, Planning & Budgeting

PENDAHULUAN

Kasus Gizi buruk sudah menjadi permasalahan global, termasuk juga di Indonesia. Hal ini disebabkan karena belum tercukupinya pemenuhan gizi yang baik dari mulai awal janin terbentuk sampai dengan anak berusia 2 tahun (Kemenkes RI, 2018).

Berdasarkan data Riskesdas pada tahun 2018, Stunting di Indonesia masih cukup tinggi yaitu sebesar 30,8%. Di provinsi Bengkulu bersumber pada hasil SSGI tahun 2021 data prevalensi stunting sebesar 22,1 %, sementara untuk data SSGI tahun 2022 mengalami penurunan 2.3% yaitu sebesar 19,8% dari target awal yang ditetapkan sebesar 18,84%. Pada tahun 2021 hasil SSGI kabupaten Bengkulu selatan memiliki angka prevalensi bayi stunting sebesar 20,8%. Selanjutnya pada tahun 2022 kabupaten Bengkulu selatan juga mengalami kenaikan kasus stunting sebesar 2.40% yaitu menjadi 23.2% . Angka prevalensi kasus stunting di kabupaten Bengkulu selatan tergolong cukup tinggi diantara 9 kabupaten lainnya yang ada

di provinsi Bengkulu (Kemenkes RI, 2022).

Upaya yang dilakukan untuk percepatan penurunan stunting di provinsi Bengkulu dilakukan dengan cara melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi antar program dan kegiatan setiap organisasi perangkat daerah baik pada ditingkat provinsi dan kabupaten/kota dengan memberikan penandaan (tagging) anggaran terkait stunting. Pemerintah daerah kabupaten Bengkulu Selatan sudah menetapkan lokus penanganan stunting sejak tahun 2020 Sebanyak 10 kelurahan/desa di kabupaten Bengkulu selatan dipilih menjadi lokus untuk pelaksanaan program antara lain desa Air sulau, Suka maju, Suka rami, Lubuk siri ulu, kelurahan Kota medan, Ganjuh, Selali, Palak siring serta kelurahan Tanjung mulia dan Masat. Pemilihan desa lokus fokus intervensi stunting ditetapkan berdasarkan indikator jumlah balita stunting dan prevalensi stunting serta tingkat kemiskinan di wilayah desa/kelurahan tersebut, dan hal ini tergambar pada master ansit dan aksi satu konvergensi stunting. Sedangkan pada Aksi 2 (dua)

konvergensi menjabarkan tentang rencana kegiatan Rencana kegiatan ini terkait dengan cakupan 64 indikator layanan esensial dan supply pada tahun berjalan dan yang akan datang.

Komitmen pemerintah Bengkulu selatan untuk aksi dua konvergensi dalam percepatan penurunan stunting juga tercantum dalam PERBUP (Peraturan Bupati) Bengkulu Selatan nomor 06 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa dalam pasal 7 yang bertujuan untuk memberikan petunjuk dan pedoman bagi pelaksanaan intervensi untuk mempercepat penanganan stunting yang dimulai dari perencanaan dan penganggaran, melalui upaya pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita, penyediaan air bersih dan sanitasi, pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui, bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui, pengembangan ketahanan pangan di desa dan kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

Pada tahun awal penerapan aksi konvergensi stunting di Kabupaten Bengkulu Selatan belum seluruhnya terlaksana secara efektif serta efisien. Hal tersebut dapat dilihat dari belum optimalnya tim percepatan penurunan stunting (TPPS) dalam koordinasi yang mana terdapat kesan belum menjadikan data dari analisis situasi sebagai dasar guna menyusun rencana aktivitas program percepatan penurunan stunting, sehingga berimplikasi mempengaruhi efektivitas program. Hingga perlu dilakukan pengkajian apakah program aksi 2 tentang penyusunan rencana kegiatan sudah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan Petunjuk teknis (juknis) penanganan stunting. Faktor yang menjadi pendorong serta penghambat pada program percepatan penurunan stunting penting menjadi kajian dan analisis.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka diperlukan kajian dan analisis sejauhmana efektivitas dari program aksi dua

konvergensi tentang penyusunan rencana kegiatan untuk memperoleh percepatan penurunan angka stunting di kabupaten Bengkulu Selatan. Fokus penelitian tentang “Efektivitas Pelaksanaan Program dan Kegiatan (Aksi 2) Konvergensi Dalam Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Bengkulu Selatan”. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas program penanganan stunting dan mengkaji faktor penghambat tercapainya efektivitas program penanganan stunting melalui aksi dua konvergensi di kabupaten Bengkulu Selatan

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan sumber data sekunder dan primer dengan melakukan analisis terhadap kelengkapan dokumen Aksi 2 dan wawancara mendalam kepada stakeholder. Pendekatan yang digunakan yaitu dengan studi kasus.

Strategi penelitian yang dilakukan dimulai dari tahap pra-lapangan, kegiatan lapangan, dan pasca-lapangan. Penelitian ini dilakukan di 10 kelurahan/desa di Kabupaten Bengkulu Selatan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai dengan Desember 2023.

HASIL PENELITIAN

Hasil Analisis Stakeholder

Model pemetaan stakeholder didapatkan dengan cara melakukan analisis stakeholder dimana sebagai proses mengumpulkan dan menganalisis informasi yang didapatkan dari data kualitatif yang dalam penelitian ini bersumber dari wawancara mendalam guna untuk menentukan kepentingan yang seharusnya dipertimbangkan pada saat memajukan serta mengoperasionalkan suatu kebijakan ataupun program. BAPPEDA, DPMD, DINKES, DP3AP2KB, dan TPPS kabupaten Bengkulu selatan merupakan

stakeholder yang termasuk dalam key stakeholder artinya seluruh OPD tersebut berkaitan langsung dalam pengambilan keputusan. Hasil analisis stakeholder, didapat bahwa kekuatan (power) dan ketertarikan (interest) stakeholder pada masing-masing OPD dalam isi atau masalah kebijakan penanganan Stunting BAPPEDA, TPPS, dan Dinkes di kabupaten Bengkulu Selatan sebagai Key Player (kekuatan dan ketertarikan tinggi) karena stakeholder tersebut berfungsi sebagai pendorong utama dalam keberhasilan strategi dan kebijakan dalam percepatan penurunan stunting. DPMD dan DP3AP2KB di kabupaten Bengkulu Selatan sebagai Keep Satisfied (Kekuatan dan ketertarikan rendah) yang merupakan stakeholder kunci utama dalam menyusun kebijakan dan perubahan perilaku masyarakat.

Pelaksanaan Konvergensi dan Integrasi dalam Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Bengkulu Selatan

Secara Nasional Pemerintah menargetkan penurunan prevalensi stunting 14% di tahun 2024 dan 12.55% untuk tingkat provinsi Bengkulu dan 11.85% untuk kabupaten Bengkulu Selatan. Pada Dokumen RPJPD untuk tahun 2025-2045 yang sedang disusun oleh Bappenas bersama Bappeda di provinsi dan kabupaten/kota sudah menetapkan angka 5% pada tahun 2045.

Terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting mencerminkan komitmen pemerintah untuk mengatasi masalah ini secara efisien. Peraturan ini berfungsi sebagai kerangka hukum Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (Stranas) yang telah berlaku sejak 2018. Hal ini bertujuan untuk memperkuat kerangka intervensi dan pengaturan kelembagaan percepatan penurunan stunting (Rahmadhita, 2020).

Untuk meningkatkan dasar hukum dan kerangka kebijakan percepatan penurunan stunting, Kementerian Dalam Negeri bersama BKKBN dan Bappenas telah merilis petunjuk

teknis (Juknis) pelaksanaan 8 aksi konvergensi penurunan stunting di tingkat daerah. Pedoman ini berfokus pada prioritas sasaran strategis, penguatan kelembagaan, intervensi layanan, serta sistem pelaporan dan evaluasi (Rahmadhita, 2020). Upaya untuk memerangi stunting melibatkan berbagai intervensi, seperti memberdayakan daerah dengan program kesadaran kesehatan dan gizi seperti pembentukan daerah berdaya untuk ibu yang sadar kesehatan dan pengenalan produk makanan inovatif seperti biskuit kacang ikan. Intervensi ini bertujuan untuk meningkatkan hasil kesehatan dan mencegah stunting pada anak-anak (Yuliantini et al., 2022).

Pendekatan multi-segi pemerintah, sebagaimana diuraikan dalam berbagai peraturan dan pedoman teknis, menggarisbawahi pentingnya upaya terkoordinasi yang melibatkan kerangka hukum, peningkatan kapasitas kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, dan intervensi yang ditargetkan untuk secara efektif mengurangi angka stunting di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Hasil penelitian menunjukkan tema-tema sebagai berikut:

(1) Pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi stunting

Pelaksanaan program aksi 8 konvergensi dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bengkulu Selatan dilaporkan berjalan dengan baik. Tindakan tersebut meliputi: analisis situasi program penurunan stunting, penyusunan rencana kegiatan, rembuk stunting, penyusunan peraturan bupati/walikota, pembinaan pelaku dan pemerintahan desa/kelurahan, sistem manajemen data stunting, pengukuran dan publikasi stunting, serta reuiu kinerja tahunan yang dilaksanakan N+1.

Hal ini didukung dengan jawaban dari seluruh informan bahwa program aksi 8 konvergensi berjalan dengan baik. Seperti ungkapan salah satu partisipan berikut:

"...Perlu dalam rangka penurunan

stunting di kab. Bengkulu Selatan yaitu Dinas Kesehatan dan DPPKB P3A di Bengkulu Selatan sedangkan kita di BAPPEDA dan OPD – OPD lain seperti Dinas Kelautan, Perikanan, Pekerjaan Umum, dan Pendidikan ada Kominfo, Dinas Sosial, ada juga dari Departemen Agama, Dukcapil, dan Bpom itu kita libatkan dalam rangka untuk sama – sama kita melaksanakan aksi penurunan stunting di Kab. Bengkulu Selatan...”

(2) Hambatan dan kendala 8 aksi konvergensi

Berdasarkan hasil review kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Bengkulu selatan terhadap kinerja 8 aksi konvergensi meliputi informasi tentang program dan kegiatan, kemajuan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan, rumusan, masukan, perbaikan, penyampaian layanan pada tahun berikutnya untuk pencegahan dan penurunan stunting, ditemukan bahwa masih banyak mengalami hambatan dan kendala terutama terkait dengan persepsi, pendanaan, baik yang bersumber dari APBD atau APBN dan sumber lainnya, Tim Pendamping Keluarga (TPK), pencatatan dan pelaporan, ego sektoral dan program. Hal ini didukung dengan jawaban dari seluruh informan. Seperti ungkapan salah satu partisipan:

“...Permasalahan – permasalahan itu yang mungkin kalau dari kami jumlah pendanaan di tahun 2023 masih bersumber pada APBD dan APBN saja, sedangkan harapan kami sebagai Kab. Bengkulu Selatan kiranya mungkin bantuan – bantuan dari pihak swasta seperti BAZNAS, CSR, dan lain – lain itu masih minim tersentuh untuk menangani stunting di Bengkulu Selatan, itu juga pendampingan terhadap sasaran catin, ibu hamil pasca salin serta baduta balita sudah kami lakukan tetapi masih juga ada yang belum semuanya tercatat dan dilaporkan oleh tim TPK kita, jadi pendataan yang kita laksanakan di Bengkulu Selatan masih kurang efektif dan juga ada belum optimal koordinasi antar OPD terkait dalam

penanganan stunting, jadi intinya kalau di dalam OPD juga belum tertular influencer masalah stunting ini masih kurang kadang – kadang kita berkoordinasi juga kadang – kadang katakanlah untuk data segala macam itu kadang – kadang kita juga masih terkendala, masih lama loadingnya....”

(3) Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan pelaksanaan 8 aksi konvergensi

Keberhasilan pelaksanaan 8 aksi konvergensi penurunan stunting di kabupaten Bengkulu selatan sangat ditentukan antara lain ketersediaan anggaran, koordinasi dan integrasi program antar OPD, keterlibatan kelompok penta-helix meliputi perguruan tinggi, swasta, organisasi masyarakat, media massa, antar satuan kerja perangkat daerah (SKPD) maupun pusat. Hal ini didukung dengan pernyataan dari seluruh informan. Seperti ungkapan salah satu partisipan:

“...Alokasi APBD, APBDES minimal 10% untuk percepatan penurunan stunting ini kita laksanakan 2. Untuk meningkatkan pendampingan terhadap 4 sasaran baik dari dana sosial, dana pengelola BUMD dan BUMN terkait itu juga, kita juga diharapkan setiap OPD menjadi bapak asuh bagi anak stunting dan membentuk dapur sehat tiap desa kelurahan dalam penyusunan gizi seimbang untuk pencegahan stunting...”

(4) Komitmen Pemerintah Daerah dalam 8 aksi konvergensi

Strategi Nasional Mitigasi Stunting di Indonesia menguraikan lima pilar penanganan stunting secara komprehensif. Pilar-pilar ini meliputi: pilar 1: komitmen dan visi kepemimpinan ; pilar ke-2: Kampanye Nasional dan Perubahan Perilaku; pilar ke-3: Konvergensi Program Pusat, Daerah dan Desa; pilar ke-empat: Ketahanan Pangan dan Gizi, serta pilar ke-5: Pemantauan dan Evaluasi. Dukungan Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah daerah dapat

memberikan dukungan dalam perencanaan dan penganggaran program penurunan stunting dengan mengalokasikan sumber daya, berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, dan memprioritaskan intervensi yang memiliki dampak terbesar pada penurunan prevalensi stunting.

Dengan menyalurkan kebijakan dan tindakan yang dilakukan dengan pilar Strategi Nasional Mitigasi Stunting dan menerapkan intervensi yang tepat sasaran, pemerintah daerah dapat berkontribusi secara signifikan untuk mengurangi angka stunting. Hal ini didukung dengan pernyataan seluruh informan. Seperti ungkapan salah satu partisipan:

“...Dari kepala daerah memang sudah menekankan kepada kita bahwasanya untuk penganggaran dari OPD – OPD itu diharapkan dapat menyentuh program stunting ini kan sudah diamankan juga pada Undang – Undang terkait dengan penyusunan APBD kita porsi – porsi anggaran terkait dana desa, dana kelurahan itu kan sekarang sudah ada regulasinya dan sekarang ini kita sudah pada tahap sampai dianggarkan dan juga memverifikasi anggaran DPA/RKA mereka sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan pada pencapaian program penurunan stunting...”

Pelaksanaan Aksi 2 (dua) Konvergensi Stunting

Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan pada Aksi 2 merupakan upaya tindak lanjut pemerintah daerah kabupaten Bengkulu Selatan dalam merealisasikan hasil rekomendasi dari analisis situasi (aksi 1). Hasil aksi 2 (dua) ini diharapkan dapat teridentifikasi rencana program atau kegiatan untuk peningkatan cakupan 64 Indikator baik esensial maupun supply serta mengintegrasikan dokumen perencanaan dan penganggaran pada tahun 2023 (tahun berjalan) dan tahun 2024 (tahun rencana), termasuk perbandingan dengan hasil rencana kegiatan tahun-tahun sebelumnya, yang nanti akan menjadi pembahasan dalam kegiatan

rembuk stunting (aksi 3) tingkat kabupaten Bengkulu selatan.

BAPPEDA kabupaten Bengkulu selatan sebagai penanggung jawab (PIC) Person In Charge, dalam penyusunan rencana kegiatan yang mendukung program penurunan stunting, bersama OPD terkait dalam pemetaan dukungan anggaran daerah tingkat kabupaten dan provinsi.

Hal ini didukung dengan jawaban dari informan terkait penyusunan rencana kegiatan ini meliputi identifikasi usulan dan rencana dukungan anggaran penurunan stunting dalam dokumen perencanaan daerah tahun anggaran berjalan dan rencana.

“...Tanggung jawab BAPPEDA untuk pelaksanaan aksi konvergensi itu kita mengkoordinir penginputan data aksi web Bangda 1 sampai 8, selain itu juga kita mengkoordinasikan penganggaran kegiatan percepatan penurunan stunting melalui tagging anggaran kegiatan verifikasi DPA dan RKA OPD...”

Hal ini didukung dengan jawaban dari informan terkait advokasi dan pencermatan dukungan anggaran penurunan stunting dalam dokumen perencanaan daerah tahun anggaran berjalan.

“...Analisis situasi itu terkait dengan lokasi dan siapa saja yang akan kita intervensi terhadap kegiatan penurunan stunting, jadi kita ada pemetaan program, pemetaan daerah, pemetaan lokasi, by name by address kita laksanakan ini dan terkait penganggaran apa saja yang akan kita intervensi terhadap mereka yang berdampak stunting maupun dari masalah calon pengantin, ibu hamil, dan ini akan kita laksanakan sehingga di tahun berjalan nanti kita sudah mempunyai menyusun program rencana kerja kita terkait dengan kegiatan penurunan stunting di Bengkulu Selatan...”

Hal ini didukung dengan jawaban dari informan terkait advokasi dan pencermatan dukungan anggaran penurunan stunting dalam dokumen perencanaan daerah tahun rencana.

“...dari pelaksanaan musrenbang kita sudah Melaksanakan pentaggingan penganggaran baik usulan dari masyarakat,

tingkat desa kecamatan sampai ke kabupaten sudah itu kita masuk ke pentaggingan anggaran direncana kerja OPD terkait dengan program kegiatan...”

Efektivitas Program Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Bengkulu Selatan (Aksi 2 Konvergensi)

Program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bengkulu Selatan, khususnya pada Aksi 2 konvergensi stunting, melibatkan penyusunan rencana kegiatan, selaras dengan rekomendasi dari Analisis Situasi pada Aksi 1. Proses ini meliputi perumusan program dan kegiatan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meningkatkan cakupan layanan intervensi dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan integrasi intervensi di Kabupaten Bengkulu Selatan untuk tahun-tahun saat ini dan yang akan datang.

Dengan memanfaatkan wawasan dari studi ini, pemerintah daerah di Kabupaten Bengkulu Selatan dapat menyesuaikan rencana kegiatan mereka dengan strategi berbasis bukti dan mengatasi faktor-faktor spesifik yang mempengaruhi stunting di wilayah mereka. Pendekatan berbasis bukti ini dapat meningkatkan efektivitas program penurunan stunting dan mengarah pada peningkatan hasil kesehatan bagi masyarakat.

PEMBAHASAN

Pemetaan Stakeholder berdasarkan Analisis identifikasi, penggolongan, kekuasaan dan kepemimpinan serta kepentingan, posisi dan komitmen para stakeholder dalam pelaksanaan Aksi 2 Konvergensi percepatan penurunan stunting.

Berdasarkan identifikasi pemetaan pemangku kepentingan, telah ditemukan bahwa peran 4 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) utama termasuk Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), Dinas Kesehatan, DP3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan, dan Keluarga Berencana), dan DPMD (Dinas

Pemberdayaan Masyarakat Desa) merupakan pemangku kepentingan penting yang terlibat langsung dalam program percepatan penurunan stunting. Para pemangku kepentingan ini memiliki kepentingan yang mempengaruhi isu-isu strategis atau masalah kebijakan, termasuk mereka yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi isu-isu ini. Pemangku kepentingan dapat memberikan informasi, sumber daya, dan keahlian yang diperlukan untuk merumuskan dan menerapkan strategi dan kebijakan yang diperlukan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi terhadap dokumen-dokumen yang terkait dengan pelaksanaan Aksi 2 konvergensi percepatan penurunan stunting maka efektifnya pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan akan sangat ditentukan dari tujuan dilaksanakannya penyusunan rencana kegiatan yang merupakan tindak lanjut dari hasil rekomendasi dari hasil analisis (Analisis Situasi) dimana Untuk meningkatkan cakupan intervensi gizi bagi sasaran penurunan stunting, sebuah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat merancang program dan kegiatan yang terfokus pada pendekatan terintegrasi dan berkelanjutan, adapun program dan kegiatan pada tahun berjalan antara lain peningkatan akses program berkualitas, peningkatan akses layanan Kesehatan dan pemberdayaan masyarakat sementara untuk program tahun rencana/meliputi monitoring dan evaluasi, penguatan kerjasama antar pemangku kepentingan, program inovatif sehingga Dokumen perencanaan seperti RKPD dan Rencana Kerja OPD harus mencakup detail dari setiap program dan kegiatan yang diusulkan, termasuk target, indikator keberhasilan, sumber daya yang diperlukan, serta langkah-langkah pemantauan dan evaluasi. Dengan demikian, efektivitas dari intervensi gizi ini dapat dipantau dan dievaluasi dengan baik dengan mengedapkan tagging baik anggaran yang bersumber dari APBN/DAK, Dana Desa, APBD, dan CSR yang mendukung prioritas penurunan stunting yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dari analisis kekuasaan dan

kepemimpinan dengan penggolongan stakeholder berdasarkan key stakeholder dan Non-Key stakeholder bahwa peran TPPS kabupaten melalui Ketua TPPS yang dijabat oleh Wakil Bupati sangat strategis, khususnya dalam penguatan koordinasi tingkat kabupaten Bengkulu Selatan sampai tingkat desa dan kelurahan, sehingga target 14 % tahun 2024 dapat tercapai. Tugas Ketua TPPS terkait dengan pelaksanaan aksi 2 antara lain mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bengkulu Selatan antar OPD maupun dengan pemangku kepentingan lainnya seperti pihak swasta, media, dan perguruan tinggi di tingkat kabupaten serta merumuskan kebijakan penyelesaian kendala dan hambatannya.

Dengan melihat kepentingan dan posisi Bappeda dan Dinas Kesehatan serta Dinas PMD serta DP3AP2KB Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dianalisis bahwa Bappeda berkomitmen tinggi, karena memiliki tanggungjawab dan kewenangan dalam implementasi aksi 2 konvergensi stunting. Bappeda Kabupaten Bengkulu Selatan dapat digolongkan sebagai stakeholder yang berkomitmen tinggi, hal ini didukung oleh regulasi di Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting dan Perka BKKBN nomor 12 tentang RAN PASTI didalam mensinkronisaikan dan mengintegrasikan dari mulai penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang terkait langsung maupun tidak langsung terhadap pencapaian 64 cakupan layanan yang terdiri dari 35 indikator supply dan 29 Indikator essential secara konvergen dan terintegrasi dalam percepatan penurunan stunting.

Adapun tiga tahapan analisis pemangku kepentingan, maka dapat dipetakan pemangku kepentingan berdasarkan Mendelow's matrix yakni Bappeda Kabupaten Bengkulu Selatan, Dinas Kesehatan dan TPPS sebagai Key Player dimana stakeholder yang memiliki kekuatan dan ketertarikan tinggi untuk pendorong utama dalam mengelola strategi kebijakan dalam mendorong keberhasilan

penanganan percepatan penurunan stunting, sedangkan DP3AP2KB dan DPMD sebagai Keep Satisfied sebagai pemangku kepentingan yang memiliki kekuatan tinggi, namun ketertarikan rendah untuk melibatkan peran serta dari organisasi masyarakat dalam mendukung percepatan penurunan stunting.

Efektivitas dan Faktor Penghambat Program Penanganan Stunting pada Aksi 2 Konvergensi Penyusunan Rencana Kegiatan Di Kabupaten Bengkulu Selatan

Dari hasil wawancara kepada key informan ditemukan bahwa kabupaten Bengkulu Selatan sudah melaksanakan 8 Aksi Konvergensi Percepatan penurunan stunting dari tahun 2018 sampai dengansaat ini. Pemerintah Kabupaten sudah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu selatan No 460.476 Tahun 2022 tentang Perubahan atas keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 460.142 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Bengkulu Selatan dengan melibatkan OPD Tekhnis dan Non Tekhnis baik dari unsur pemerintah, Akademisi, Organisasi masyarakat , akan tetapi dari unsur Media dan swasta belum terlibat. Hambatan dan kendala masih ditemukan dimana terkait dengan perbedaan persepsi dari pelaksana dimasing-masing OPD soal tugas dan tanggungjawab, tagging anggaran baik yang bersumber dari APBN, APBD, Dana Desa dan CSR, pencatatan dan pelaporan yang masih sering terlambat dikarenakan sulitnya mendapatkan data dan informasi serta masih ditemukannya ego sektoral dan program dari masing-masing OPD khususnya terkait dengan intervensi sensitif, akan tetapi faktor yang mendorong keberhasilan pelaksanaan konvergensi stunting terletak dari ketersediaan anggaran, koordinasi dan integrasi serta keterlibatan kelompok penta-helix serta komitmen pemerintah daerah kabupaten Bengkulu Selatan didalam menjalan 5 (lima) pilar Staranas.

Pelaksanaan Aksi 2 Konvergensi stunting berdasarkan hasil telusur dan pengecekan dokumen serta pengukuran terhadap indikator dan ceklist isian dokumen pendukung aksi 2 dan dokumen master Ansit dan review kinerja tahunan dalam Aksi 8 yang dilaksanakan pada N+1 bahwa Kabupaten Bengkulu Selatan sudah melakukan pengisian dan pelaporan pada

<https://aksi.bangda.kemendagri.go.id/emonev/dashkab> walaupun belum sesuai dengan timeline yang ditetapkan oleh Bappenas, kemendagri dan BKKBN, hal ini juga didukung dari hasil wawancara ditemukan bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkulu selatan sudah memiliki Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Kewenangan Desa Dalam Upaya Pencegahan Stunting dan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 63 Tahun 2023 Tentang Percepatan Penurunan Stunting, Instruksi Bupati Bengkulu Selatan Nomor: 800/388/Kepeg/2022 Tentang Pencegahan Stunting dari hulu melalui aplikasi Elsimil Di Kabupaten Bengkulu Selatan. Kebijakan dan strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan berupa diterbitkannya peraturan Bupati/Walikota tentang “Percepatan penurunan Stunting” adalah untuk memberikan kepastian hukum yang dapat digunakan sebagai rujukan bagi OPD, desa dan kelurahan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung upaya pencegahan dan penurunan Stunting.

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini terdapat pada penggunaan lokasi penelitian, dan informan wawancara mendalam. Pada lokasi penelitian hanya diambil pada satu lokus kabupaten Bengkulu selatan dari 10 lokus yang sudah ditetapkan di Provinsi Bengkulu, sehingga dimungkinkan akan ada perbedaan persepsi yang mempengaruhi hasil analisis terhadap efektifitas pelaksanaan aksi 2 konvergensi stunting. Informan dalam wawancara mendalam hanya menggunakan

lima stakeholder yang ada dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Bengkulu Selatan dalam pentahelix yang dapat dijadikan sumber informasi dan sumber daya, serta keahlian yang dibutuhkan dalam perumusan dan pengimplementasian strategi terkait efektifitas keberhasilan pelaksanaan aksi 2 Konvergensi Stunting secara khusus dan 8 Aksi Konvergensi secara umum.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini terdapat program percepatan penurunan stunting dengan pendekatan penyusunan rencana kegiatan (aksi 2) konvergensi stunting di kabupaten Bengkulu Selatan sudah berjalan dengan efektif sesuai dengan standar dan indikator dan output yang telah ditetapkan.

SARAN

Berdasarkan masalah kebijakan yang ditemukan selama penelitian, direkomendasikan:

- a. BAPPEDA
Melakukan tagging program/kegiatan stunting terutama dari dana desa, CSR dan sumber-sumber pendanaan lainnya secara terintegrasi serta Melakukan monitoring dan evaluasi secara terintegrasi dengan TPPS.
- b. Dinas Kesehatan
Optimalisasi realisasi pemanfaatan Dana DAK Non Fisik untuk Pemberian PMT Lokal dan melakukan peningkatan kompetensi kader posyandu melalui pendidikan dan pelatihan kader dengan memanfaatkan dana desa.
- c. Dinas PMD
Mendorong peningkatan pencapaian SDGs desa dan pemanfaatan dana desa untuk alokasi kegiatan pencegahan dalam

mengatasi stunting sebesar 10 20% serta melakukan pembinaan dan pengawasan serta monitoring dan evaluasi perangkat desa dalam pemanfaatan dana yang ada.

d. DP3AP2KB

Sebagai sekretariat TPPS pada tingkat kabupaten untuk selalu bersinergi dengan kelompok pentahelix lainnya dalam penyusunan program kerja terkait peta jalan terintegrasi untuk pencegahan dan atasi stunting di tingkat kabupaten sampai ke desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Alidi M.S. 2024. "Efektifitas Pelaksanaan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Bengkulu Selatan". Hasil Wawancara Pribadi: 13 Januari 2024, Universitas Indonesia Maju
- Andjar, Prasetyo., Nana, Noviana., Weni, Rosdiana., Makhdonal, Anwar., Hartiningsih., Hendrixon., Bakti, Putri, Harwijayanti., Mochammad, Fahlevi. (2023). Stunting Convergence Management Framework through System Integration Based on Regional Service Governance. Sustainability. 10.3390/su15031821
- Bappenas. Petunjuk Teknis Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Di Kabupaten Kota.; 2019
- Balitbang Kemenkes RI. HASIL UTAMA RISKEDAS 2018.; 2018
- Bappenas. Petunjuk Teknis Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Di Kabupaten Kota.; 2019
- Balitbang Kemenkes RI. HASIL UTAMA RISKEDAS 2018.; 2018
- Black, R. E., Williams, S. M., Jones, I. E., & Goulding, A. (2002). Children who avoid drinking cow milk have low dietary calcium intakes and poor bone health. *The American journal of clinical nutrition*, 76(3), 675-680.
- Dewi, Marhaeni, Diah, Herawati., Deni, Kurniadi, Sunjaya. (2022). Implementation Outcomes of National Convergence Action Policy to Accelerate Stunting Prevention and Reduction at the Local Level in Indonesia: A Qualitative Study. *International Journal of Environmental Research and Public Health*. 10.3390/ijerph192013591
- Dewey, K.G., & Begum., K. Long-term consequences of stunting in early life. *Maternal and Child Nutrition* (2011), 7 (Suppl. 3), pp. 5–18. 10.1111/j.1740-709.2011.00349.x
- Kemenkes, RI.2022.Riset Kesehatan Dasar 2018. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
- Kementerian Kesehatan RI. Peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 39 tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan program Indonesia sehat dengan pendekatan keluarga. Jakarta : Kementerian Kesehatan RI; 2016. p. 1–165.
- Kementerian Dalam Negeri (2023), E-Monev pemantauan 8 (delapan) Aksi Konvergensi. diakses pada 28 Februari 2024, <https://www.aksi.bangda.kemendagri.go.id/emonev/dashboard/>
- Kemenkes RI (2022). Buku Saku: Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022. Badan kebijakan pembangunan Kesehatan. Jakarta
- Lubis, H. S., & Husaini, M. (2009). Teori Organisasi : Suatu Pendekatan Makro. Pusat Antar Ilmu-ilmu Sosial UI.
- Mukhtar. 2013. Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif. Jakarta: Referensi (GP Press Group)
- Moch., Farhan, Hermawan., Eka, Purna, Yudha., Kuswarini, Kusno., Adi, Tahir, Nugraha. (2023). Konvergensi aktor kelembagaan dalam penanganan stunting di kabupaten sumedang. *Mimbar agribisnis*, doi: 10.25157/ma.v9i1.8968

- Multicentre Growth Reference Study. (2010). WHO Child Growth Standards based on length / height , weight and age. 76–85. <https://doi.org/10.1080/08035320500495548>
- Pasolong, H. (2007). Teori Administrasi Publik. ALFABETA.
- Permanasari, Y., Permana, M., Pambudi, J., Rosha, B. C., Susilawati, M. D., Rahajeng, E., ... & Prasodjo, R. S. (2020). Tantangan Implementasi Konvergensi pada Program Pencegahan Stunting di Kabupaten Prioritas. *Media Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan*, 30(4).
- Pusdatin Kemenkes, RI 2016. Pusat Data dan Informasi Selanjutnya, Kementerian Kesehatan
- Rika, Yulia, Iryani., Sri, Maulidiah., Khairul, Rahman., Panca, Setyo, Prihatin., Rangi, Ade, Febrian. (2022). Capacity of community government in convergence stunting prevention in Sinaboi countries Sinaboika district, Rokan Hilir district. *International Journal of Health Sciences (IJHS)*, doi: 10.53730/ijhs.v6ns4.5595
- Syahrir, Syahrir., Idris, Idris., Nurul, Fuady, Fitriyani, A. (2023). Implementation of Stunting Convergency Actions to the Coverage of Nutrition Sensitive Intervention Programs. *Jurnal Ilmiah kesehatan*, doi: 10.36590/jika.v5i1.527
- Suprihartono, E., Bakhri, M. S., & Hidayat, M. (2019). Non Cost Recovery Project: Kasus Stunting di Indonesia.
- Siagian, S. P. (2002). Manajemen Sumberdaya Manusia. Bumi Aksara.
- Stewart, C. P., Iannotti, L., Dewey, K. G., Michaelsen, K. F., & Onyango, A. W. (2013). Contextualising complementary feeding in a broader framework for stunting prevention. 9, 27–45. <https://doi.org/10.1111/mcn.12088>
- Teguh, Suharto., Asriwati, Amirah., Rizki, Ichwansyah. (2022). Implementation of Convergence Action to Accelerate Stunting Reduction in Labuhan Batu Regency, North Sumatra. *Journal of Community Health Provision*, doi: 10.55885/jchp.v2i3.142
- Wüstefeld, M., Marzara, S., & Korenromp, E. (2015). Nutrition Targets and Indicators for the Post-2015 Sustainable Development Goals. *SCN News*, 41, 37–43.
- WHO (2021). Global Nutrition Target 2025 Stunting: Policy brief. Departement of Nutrition For Health and Development. Geneva, Switzerlan
- Yuliana, Yuliana., Hasanudin, Nuru., Berlian, Kando, Sianipar. (2022). Kejadian Stunting Berhubungan dengan 8 Aksi Konvergensi. *Jurnal Keperawatan Silampari*. 10.31539/jks.v6i1.4221